IMPLEMENTASI QRIS UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL UMKM KAWASAN WISATA NGEBEL DI DESA WAGIR LOR PONOROGO

Ahmad Zaini[1], Eka Faizin Hidayat[2], M Syamsudin[3]

Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

ahmadzaini@gmail.com.[1] , ekafaizinhidayat07@gmail.com[2] ,
muhammadsamsudin1967@gmail.com[3]

ABSTRAK

Transformasi sistem pembayaran nasional melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) bertujuan memperluas inklusi keuangan pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kawasan Wisata Telaga Ngebel di Desa Wagir Lor, Ponorogo menerima ribuan wisatawan setiap pekan dengan preferensi tinggi terhadap transaksi nontunai (*cashless*), namun mayoritas UMKM lokal belum mengoptimalkan QRIS. Penelitian ini menganalisis implementasi, kendala penerapan QRIS, serta strategi penguatan literasi digital dan kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk mengembangkan ekonomi digital UMKM. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara *purposive sampling*. Data dianalisis secara induktif menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) dan Teori Implementasi Kebijakan, dengan uji keabsahan melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan baru sekitar 15% UMKM di Desa Wagir Lor yang aktif menyediakan QRIS, dengan manfaat berupa kemudahan melayani wisatawan, percepatan transaksi, pencegahan uang palsu, dan otomatisasi pencatatan keuangan. Sebaliknya, 85% UMKM lainnya terkendala rendahnya literasi digital, kebiasaan transaksi tunai, kekhawatiran kesalahan teknis, ketidakstabilan jaringan internet, serta minimnya pendampingan berkelanjutan. Strategi optimalisasi dilakukan melalui pelatihan praktis dari lapak ke lapak (*door-to-door coaching*) yang didukung sinergi Perangkat Desa Wagir Lor, Dinas Industri, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Ponorogo, pengelola wisata, serta paguyuban UMKM guna mewujudkan kemandirian ekonomi digital yang inklusif.

Kata Kunci: *QRIS, UMKM, Literasi Digital*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ialah salah satu ukuran dan pendorong utama yang ditujukan untuk melihat keberhasilan transformasi struktural pada sistem perekonomian global menuju era ekonomi digital di Indonesia. Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) meluncurkan standar pembayaran nasional berbasis kode respons cepat atau *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) untuk mengintegrasikan seluruh layanan pembayaran nontunai. Kebijakan standardisasi ini memfasilitasi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menyediakan layanan transaksi yang mengusung prinsip UNGGUL, yaitu Universal, Gampang, Untung, dan Langsung (Sriekaningsih, Riyanto, & Prakasa, 2022). Integrasi berbagai aplikasi dompet digital (*e-wallet*) dan mobile banking ke dalam satu kode QR tunggal memungkinkan masyarakat melakukan transaksi lintas platform secara efisien dan aman (Annisa, Rahawarin, & Pattimukay, 2023). Akselerasi digitalisasi pembayaran ini bertujuan memperluas inklusi keuangan nasional serta memperkuat daya saing pelaku usaha lokal di tengah pesatnya arus modernisasi ekonomi.

Implementasi sistem pembayaran digital melalui QRIS memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi operasional dan pertumbuhan pendapatan pelaku usaha mikro di berbagai daerah. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa adopsi pembayaran digital mempercepat proses transaksi, meminimalkan risiko peredaran uang palsu, serta menghilangkan kendala penyediaan uang kembalian pada aktivitas jual beli (Roni, Batubara, Zahra, Irvansyah, & Siregar, 2026). Selain itu, pencatatan riwayat transaksi yang berlangsung secara otomatis dan *real-time* membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan secara lebih akuntabel dan transparan (Zaimar, 2025). Kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat dari teknologi pembayaran nontunai ini turut meningkatkan kepuasan konsumen serta mendorong kenaikan volume penjualan pada sektor kuliner dan jasa di kawasan pariwisata (Jodi & Irwansyah, 2025; Sinaga, Jannah, Raafigustina, Sitompul, & Lusa, 2025). Oleh karena itu, penguasaan teknologi finansial menjadi instrumen vital bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa agar mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen modern.

Kondisi yang serupa terkait besarnya potensi pengembangan ekonomi digital berbasis pariwisata juga tampak nyata di Kawasan Wisata Telaga Ngebel, khususnya di Desa Wagir Lor, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Kawasan Wisata Telaga Ngebel merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Ponorogo yang menarik ribuan wisatawan dari berbagai luar daerah pada setiap pekan maupun musim liburan. Para wisatawan luar daerah

tersebut umumnya memiliki preferensi tinggi terhadap penggunaan transaksi digital (*cashless*) dan tidak selalu membawa uang tunai dalam jumlah besar saat berwisata. Berdasarkan observasi awal dan studi pendahuluan di lokasi, penggunaan QRIS pada sejumlah unit usaha di kawasan wisata ini terbukti memberikan kemudahan bagi pengunjung luar daerah, meningkatkan keamanan transaksi dari risiko uang palsu, serta mempercepat antrean pembayaran. Kondisi geografis dan demografis Desa Wagir Lor sebagai penyangga utama kawasan wisata menjadikan wilayah ini sangat strategis untuk mengoptimalkan ekosistem ekonomi digital bagi pelaku UMKM lokal.

Meskipun potensi pasar digital di kawasan wisata tersebut sangat besar, terdapat kesenjangan yang nyata antara kondisi ideal kebijakan digitalisasi pembayaran dengan realitas implementasi pada UMKM lokal di Desa Wagir Lor. Secara ideal, tingginya arus kunjungan wisatawan berorientasi cashless serta kemudahan akses pendaftaran merchant harus diikuti oleh pemanfaatan QRIS secara merata dan optimal oleh seluruh pelaku usaha di sekitar kawasan wisata. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM lokal di Desa Wagir Lor belum memanfaatkan sistem pembayaran QRIS secara optimal dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Berdasarkan observasi awal, diperkirakan baru sekitar 15% UMKM di kawasan tersebut yang aktif menyediakan layanan QRIS.

Para pelaku usaha masih menghadapi kendala mendasar berupa rendahnya tingkat literasi digital yang berdampak pada rendahnya persepsi kebermanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) terhadap teknologi tersebut. Hal ini juga diperparah dengan kuatnya ketergantungan budaya masyarakat pada kebiasaan bertransaksi secara tunai. Selain itu, keterbatasan stabilitas jaringan internet pada beberapa titik geografis desa, kekhawatiran pedagang terhadap potensi kesalahan teknis transaksi, serta ketiadaan program pendampingan yang berkelanjutan dari instansi terkait turut menghambat adopsi teknologi ini. Hal ini sejalan dengan temuan Awaluddin et al. (2025) serta Saputra et al. (2026) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi digital dan minimnya pendampingan pascasosialisasi menjadi faktor penghambat utama kegagalan transformasi perilaku digital UMKM di wilayah perdesaan.

Permasalahan ketidaksiapan pelaku UMKM dalam mengimplementasikan QRIS tersebut menjadi fokus penting yang harus segera ditangani karena akan menimbulkan dampak negatif yang serius apabila tidak segera diteliti dan dicarikan solusi secara komprehensif. Pelaku UMKM lokal di Desa Wagir Lor berisiko kehilangan potensi pendapatan (*opportunity loss*) secara berkelanjutan akibat ketidakmampuan mereka dalam melayani wisatawan luar daerah yang hanya mengandalkan instrumen pembayaran nontunai. Dalam jangka panjang, stagnasi

adopsi teknologi pembayaran ini akan melemahkan daya saing usaha lokal, menghambat inklusi keuangan perdesaan, serta memperlambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan penyangga wisata Telaga Ngebel. Tanpa adanya evaluasi mendalam mengenai strategi penguatan pemahaman pelaku usaha dan pola kolaborasi antarpemangku kepentingan, program digitalisasi UMKM di daerah wisata hanya akan menjadi seremoni administratif tanpa keberlanjutan fungsi.

Hasil dari penelitian yang dilakukan pada tulisan ini nantinya dapat memberikan kontribusi baik secara akademis ataupun kebijakan. Kontribusi akademis yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah hasil penelitian dapat memperkuat argumen yang dijelaskan oleh teori *Technology Acceptance Model* (TAM) serta teori implementasi kebijakan, dan dipergunakan sebagai sumber acuan bagi civitas academica (mahasiswa, dosen, dan peneliti) untuk dapat melakukan penelitian dengan tema yang sejenis. Selain itu, kontribusi kebijakan yang dihasilkan dari hasil penelitian ini adalah dapat dipergunakan oleh pemerintah desa, pengelola kawasan wisata, dan pihak pendamping sosialisasi untuk menentukan kebijakan, program, dan arah pengembangan ekonomi digital guna menciptakan kesejahteraan bagi pelaku UMKM lokal melalui optimalisasi penerapan QRIS. Berdasarkan urgensi permasalahan tersebut, tulisan ini mengkaji secara mendalam penelitian yang berjudul **"Implementasi Penerapan QRIS untuk Pengembangan Ekonomi Digital UMKM di Kawasan Wisata Ngebel: Studi pada Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo".**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif untuk menyajikan gambaran mendalam mengenai implementasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh pelaku UMKM di Kawasan Wisata Ngebel, Desa Wagir Lor, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih pendekatan ini guna memahami sudut pandang, pengalaman, serta perilaku pelaku usaha mikro secara alamiah (natural setting) saat beradaptasi dengan sistem pembayaran digital (Moleong, 2018; Sugiyono, 2019).

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi lapangan, dan dokumentasi (Creswell & Creswell, 2018). Peneliti menentukan informan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian (Moleong, 2018). Informan penelitian meliputi pelaku UMKM kuliner dan jasa di Desa Wagir Lor, perangkat Pemerintah Desa Wagir Lor, pengelola kawasan wisata, serta pihak pendamping dari Dinas Industri, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Ponorogo.

Peneliti menganalisis data secara induktif dengan mengidentifikasi tema utama berdasarkan dimensi Technology Acceptance Model (Davis, 1989) dan Teori Implementasi Kebijakan (Edwards III, 1980). Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi lokasi, serta dokumen pendukung. Metode ini memberikan gambaran akurat mengenai implementasi, kendala, dan strategi pengembangan ekonomi digital UMKM di Desa Wagir Lor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Pembayaran QRIS beserta Kendala yang Dihadapi oleh Pelaku UMKM di Kawasan Wisata Ngebel, Desa Wagir Lor, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo

Ekonomi digital di daerah wisata hanya bisa tumbuh jika kesiapan alat transaksi pedagang lokal sejalan dengan kebiasaan belanja wisatawan (Iskandar et al., 2025). Kawasan Wisata Telaga Ngebel di Desa Wagir Lor, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo sebenarnya punya modal besar untuk itu. Setiap akhir pekan dan musim libur, ribuan pengunjung dari luar kota berdatangan, dan sebagian besar dari mereka terbiasa membayar secara nontunai (*cashless*) ketimbang membawa banyak uang tunai. Namun, kondisi di lapangan justru memperlihatkan ketimpangan. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan baru sekitar 15% pelaku UMKM di Desa Wagir Lor yang aktif menyediakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), sedangkan 85% sisanya masih mengandalkan pembayaran tunai. Kesenjangan adopsi ini dapat dilihat lebih jelas melalui kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM) (Davis, 1989; Septiyah et al., 2026) dan Teori Implementasi Kebijakan Publik (Edwards, 1980; Annisa et al., 2023).

Bagi 15% pedagang yang sudah memakai QRIS, keputusan mereka bertahan banyak dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) (Davis, 1989; Daulay et al., 2026). Pedagang kuliner dan penyedia jasa wisata yang sudah paham mekanismenya merasa sistem *Merchant Presented Mode* (MPM)—cukup memasang satu papan kode QR statis di lapak—sangat memudahkan transaksi harian (Annisa et al., 2023). Dulu, menerima pembayaran digital terasa repot karena pedagang harus menyiapkan banyak rekening atau mesin *Electronic Data Capture* (EDC). Kini, QRIS dengan prinsip UNGGUL (Universal, Gampang, Untung, dan Langsung) menyatukan berbagai kode QR dari beragam Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dalam satu kanal saja (Bank Indonesia, 2019; Buchdadi et al., 2024; Sriekaningsih et al., 2022). Pedagang di Desa Wagir Lor pun bisa langsung menerima pembayaran dari dompet digital (*e-wallet*) maupun *mobile banking* wisatawan tanpa perlu menguasai teknis yang rumit.

Selain praktis, kelompok pedagang ini juga merasakan langsung manfaatnya bagi kelancaran usaha (*perceived usefulness*) (Davis, 1989; Jodi & Irwansyah, 2025). Mereka tidak lagi kehilangan pembeli (*opportunity loss*) hanya karena wisatawan kehabisan uang tunai di lokasi wisata. Saat kawasan wisata sedang ramai, pemindaian kode QR mempercepat antrean karena pedagang tidak perlu repot mencari uang kembalian pecahan kecil (Sinaga et al., 2025; Roni et al., 2026). Risiko menerima uang palsu atau kehilangan uang fisik di lapak juga bisa ditekan (Sinaga et al., 2025; Roni et al., 2026). Dari sisi pengelolaan usaha, aplikasi QRIS mencatat setiap transaksi masuk secara otomatis dan *real-time*, sehingga membantu pedagang memisahkan uang dagangan dari uang rumah tangga dan membuat pembukuan lebih rapi serta transparan (Zaimar, 2025).

Sebaliknya, 85% pelaku UMKM lain di Desa Wagir Lor masih enggan beralih ke QRIS. Jika dilihat dari pengembangan model TAM di wilayah perdesaan, kendala utamanya adalah rendahnya literasi digital yang memicu tingginya kekhawatiran terhadap risiko (*perceived risk*) (Daulay et al., 2026; Weku et al., 2026). Banyak pedagang lokal belum terbiasa mengoperasikan aplikasi keuangan, mulai dari mengecek apakah uang benar-benar sudah masuk hingga mencairkan saldo (*settlement*) ke rekening bank. Ketidaktahuan ini menimbulkan rasa cemas akan terjadinya kesalahan teknis, misalnya pembeli sudah menunjukkan bukti bayar berhasil di ponselnya, tetapi saldo pedagang belum bertambah (Daulay et al., 2026). Untuk usaha mikro dengan keuntungan harian yang tipis, kehilangan uang puluhan ribu rupiah akibat salah transaksi terasa sangat berat. Rasa takut inilah yang membuat mereka mengabaikan manfaat QRIS.

Hambatan tersebut makin kuat karena kebiasaan masyarakat Desa Wagir Lor yang masih sangat bergantung pada uang tunai (*cash-centric culture*). Perputaran modal pedagang kuliner di sekitar Telaga Ngebel berjalan sangat cepat dan harian. Begitu selesai berjualan, mereka langsung butuh uang tunai untuk belanja bahan baku di pasar tradisional keesokan paginya, di mana para pemasok juga masih meminta pembayaran tunai. Ketika hasil jualan masuk ke saldo QRIS, pedagang yang kurang paham layanan perbankan merasa harus melewati proses tambahan yang memakan waktu, tenaga, dan biaya jika harus menarik uang di ATM atau agen bank. Akhirnya, uang tunai tetap dianggap jauh lebih praktis, dan inklusi keuangan di kawasan wisata ini pun jalan di tempat (Awaluddin et al., 2025).

Jika ditinjau dari sisi kebijakan publik, lambatnya penggunaan QRIS di Desa Wagir Lor mencerminkan belum optimalnya empat faktor utama dalam Teori Implementasi Kebijakan Edwards (1980), yaitu sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi (Annisa et al., 2023). Dari sisi sumber daya fisik, lokasi Desa Wagir Lor yang berada di perbukitan sekitar

Telaga Ngebel membuat sinyal seluler dan internet tidak merata, bahkan ada beberapa titik *blank spot*. Jaringan yang putus-nyambung sering membuat kode QR gagal dipindai atau notifikasi uang masuk terlambat muncul di ponsel pedagang. Kendala sinyal seperti ini langsung menurunkan kepercayaan pedagang dan wisatawan terhadap layanan pembayaran digital (Edwards, 1980).

Persoalan lain datang dari lemahnya komunikasi dan tidak adanya pendampingan jangka panjang dari instansi terkait (Edwards, 1980; Saputra et al., 2026). Selama ini, pengenalan QRIS di daerah cenderung dilakukan sekadar seremonial dan satu arah (*top-down*). Instansi sering kali hanya mengejar target jumlah *merchant* yang terdaftar tanpa menindaklanjutinya dengan pendampingan di lapangan. Akibatnya, saat aplikasi bermasalah, pedagang tidak tahu harus bertanya ke siapa. Kondisi ini sejalan dengan temuan Awaluddin et al. (2025) serta Saputra et al. (2026) bahwa digitalisasi UMKM desa tanpa pendampingan rutin hanya melahirkan adopsi semu (*pseudo-adoption*)—pedagang punya kode QRIS, tetapi tidak memakainya. Artinya, mendorong penggunaan QRIS di Telaga Ngebel tidak cukup hanya mengandalkan kecanggihan aplikasinya, melainkan perlu perbaikan bersamaan pada literasi digital, alur perputaran modal lokal, kualitas jaringan internet, dan pendampingan teknis yang berkelanjutan.

Strategi Penguatan Literasi Digital dan Sinergi Kolaborasi antara Perangkat Desa Wagir Lor, Dinas Industri, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Ponorogo, serta Pelaku Usaha dalam Mengoptimalkan Penerapan QRIS untuk Pengembangan Ekonomi Digital UMKM

Mengatasi rendahnya penggunaan QRIS yang baru menyentuh angka 15% di Desa Wagir Lor membutuhkan perubahan pendekatan, dari sekadar sosialisasi administratif menjadi pembangunan ekosistem bersama. Merujuk pada *Technology Acceptance Model* (TAM) (Davis, 1989; Daulay et al., 2026) dan Teori Implementasi Kebijakan (Edwards, 1980; Annisa et al., 2023), beban adaptasi teknologi tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pedagang mikro yang terbatas sumber dayanya. Diperlukan langkah nyata berupa penguatan literasi digital yang praktis serta kerja sama lintas pihak antara Perangkat Desa Wagir Lor, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Perdagkum)/Dinas Industri, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Ponorogo, pengelola wisata, dan pelaku UMKM setempat.

Untuk memperkuat kapasitas pedagang, edukasi literasi digital harus diarahkan agar mereka merasa QRIS mudah dipakai (*perceived ease of use*) sekaligus mengurangi rasa takut akan risiko (*perceived risk*) (Davis, 1989; Daulay et al., 2026; Weku et al., 2026). Penyuluhan satu arah di balai desa perlu diganti dengan pelatihan langsung di tempat usaha (*on-the-spot*

training) atau pendampingan dari lapak ke lapak (*door-to-door coaching*). Materinya cukup difokuskan pada tiga hal praktis: cara memastikan notifikasi pembayaran masuk secara *real-time* agar terhindar dari bukti transfer palsu, cara membaca riwayat transaksi harian di aplikasi, serta cara mencairkan saldo digital (*settlement*) menjadi uang tunai lewat agen perbankan desa (Laku Pandai) tanpa harus jauh-jauh ke kota. Jika pedagang sudah mahir mengantisipasi risiko dan tahu cara mencairkan uangnya dengan cepat, kebiasaan bergantung pada uang tunai perlahan akan berkurang dan minat memakai QRIS pun tumbuh (Awaluddin et al., 2025; Daulay et al., 2026).

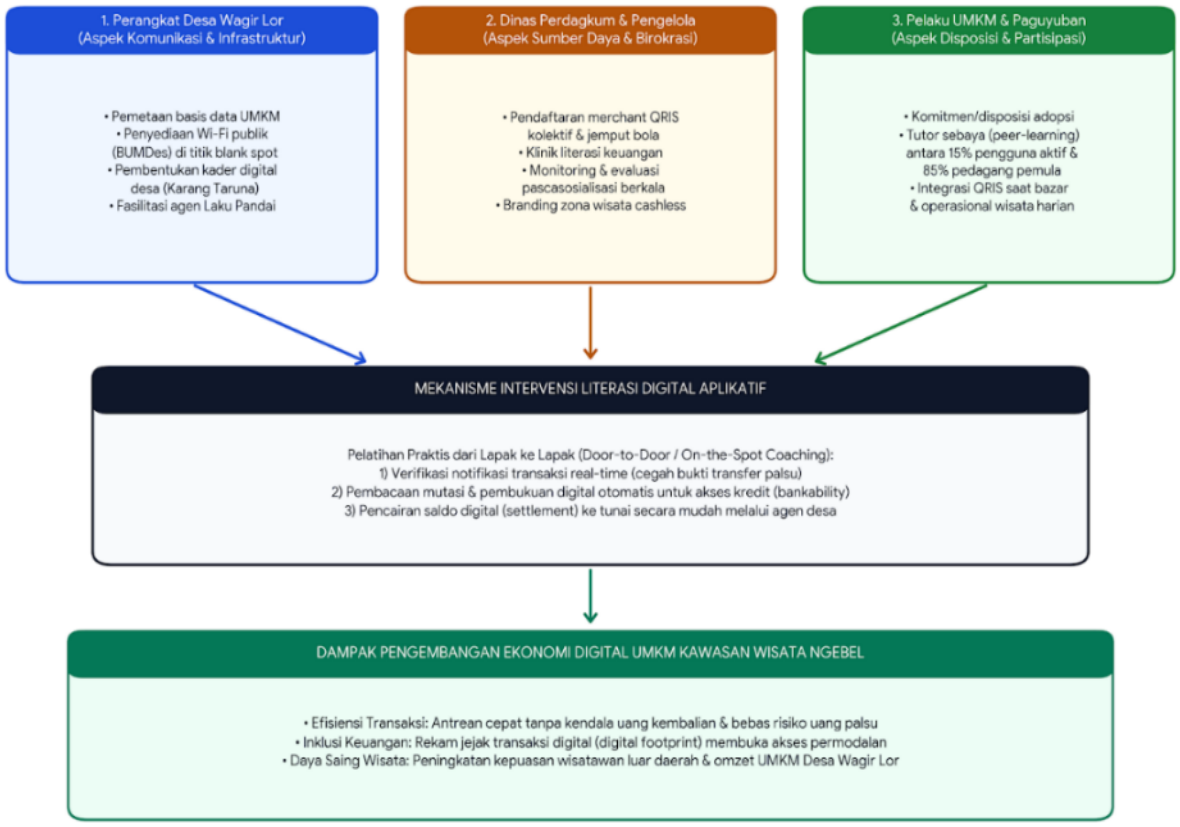
Agar program ini berjalan terus-menerus, pelaksanaannya perlu menopang empat variabel kebijakan dari Edwards (1980) komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi—melalui pembagian peran tiga aktor utama:

1. **Peran Strategis Perangkat Pemerintah Desa Wagir Lor:** Pemerintah desa berfungsi sebagai penghubung komunikasi langsung dengan para pedagang (Edwards, 1980; Annisa et al., 2023). Langkah konkretnya mencakup pendataan UMKM yang belum memiliki atau belum mengaktifkan QRIS, penyediaan jaringan Wi-Fi publik (melalui desa atau BUMDes) di titik-titik *blank spot*, serta pembentukan kader pendamping digital dari kalangan pemuda desa atau Karang Taruna. Kader lokal inilah yang siap membantu pedagang setiap hari jika muncul kendala teknis di lapangan (Saputra et al., 2026).
2. **Peran Dinas Industri, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Ponorogo serta Instansi Pendamping:** Dinas terkait bersama pengelola kawasan wisata dan PJSP bertugas menyiapkan dukungan sumber daya serta birokrasi yang memudahkan (Edwards, 1980; Buchdadi et al., 2024). Mereka dapat memfasilitasi pendaftaran *merchant* QRIS secara kolektif tanpa proses berbelit, membuka klinik konsultasi literasi keuangan secara rutin, dan memantau keaktifan transaksi pedagang setelah sosialisasi. Di samping itu, dinas dan pengelola wisata dapat memasang informasi bahwa kawasan tersebut siap melayani transaksi nontunai (*cashless-ready tourism zone*) agar wisatawan maupun pedagang sama-sama terbiasa (Rahmadaniah et al., 2025).
3. **Peran Aktif dan Disposisi Pelaku UMKM Lokal:** Seluruh dukungan di atas tetap membutuhkan kemauan dan keterbukaan (*disposition*) dari para pedagang kuliner dan jasa di Desa Wagir Lor sendiri (Edwards, 1980; Awaluddin et al., 2025). Melalui paguyuban pedagang, kelompok 15% pengguna aktif QRIS dapat berbagi pengalaman (*peer-learning*) dengan 85% pedagang lainnya. Cara belajar antarsesama pedagang

seperti ini biasanya lebih mudah diterima karena mereka melihat langsung bukti keberhasilan rekan di lokasi yang sama.

Keterpaduan peran lintas pihak dan pelatihan praktis di tingkat lapak tersebut membentuk ekosistem kolaboratif sebagaimana terlihat pada Bagan 4.1 berikut:

Bagan 4.1 Model Sinergi Kolaborasi QRIS 1



Jika strategi literasi digital dan kolaborasi ini dijalankan secara konsisten, dampaknya akan langsung terasa pada pertumbuhan ekonomi digital UMKM di Desa Wagir Lor. Dari sisi efisiensi dan inklusi keuangan, transaksi QRIS secara otomatis merekam arus kas usaha secara *real-time* sehingga pedagang memiliki rekam jejak transaksi digital (*digital footprint*) yang jelas dan akuntabel (Zaimar, 2025). Catatan keuangan formal ini memudahkan UMKM desa mengakses pembiayaan atau kredit usaha dari lembaga keuangan resmi untuk memperbesar skala usahanya (Afriyanti, 2022; Rahmadaniah et al., 2025; Zaimar, 2025).

Sementara itu, dari sisi daya saing, kesiapan seluruh pedagang menerima pembayaran QRIS berprinsip UNGGUL akan meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan ribuan wisatawan luar daerah (Sriekaningsih et al., 2022; Jodi & Irwansyah, 2025). Transaksi lintas platform yang lancar menghilangkan hambatan bayar pengunjung, mendorong kenaikan omzet harian, mencegah peredaran uang palsu, sekaligus membangun citra modern bagi UMKM di sekitar

Telaga Ngebel (Sinaga et al., 2025; Roni et al., 2026). Oleh karena itu, penguatan literasi digital yang aplikatif, pendampingan teknis yang rutin, serta kerja sama aktif antara Perangkat Desa Wagir Lor, Dinas Industri, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Ponorogo, dan pelaku usaha menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi digital UMKM di Kawasan Wisata Ngebel.

KESIMPULAN

Penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada pelaku UMKM di Kawasan Wisata Ngebel, Desa Wagir Lor saat ini belum berjalan maksimal karena baru sekitar 15% pedagang yang memanfaatkannya secara aktif. Bagi kelompok yang sudah menggunakannya, QRIS terbukti mempermudah transaksi dengan wisatawan luar daerah yang tidak membawa uang tunai, memangkas waktu pembayaran, menekan risiko uang palsu, sekaligus membuat pencatatan keuangan berjalan otomatis. Di sisi lain, 85% pelaku usaha lainnya masih terhambat oleh minimnya literasi digital, kuatnya kebiasaan memakai uang tunai, rasa khawatir terhadap kesalahan teknis transaksi, sinyal internet yang belum stabil, serta belum adanya pendampingan jangka panjang.

Untuk menjawab persoalan tersebut, langkah optimalisasi QRIS di Desa Wagir Lor ditempuh lewat pelatihan praktis langsung dari lapak ke lapak (*door-to-door coaching*) yang berfokus pada verifikasi transaksi, pembukuan digital, dan prosedur pencairan saldo. Upaya ini diperkuat oleh kerja sama lintas pihak, yakni Perangkat Desa Wagir Lor yang menyediakan akses internet desa dan kader pendamping lokal, Dinas Industri, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Ponorogo yang memfasilitasi pendaftaran *merchant* beserta pemantauan rutin, serta keterlibatan aktif paguyuban UMKM. Sinergi bersama inilah yang menjadi kunci dalam mendorong efisiensi usaha, memperluas inklusi keuangan, dan meningkatkan daya saing ekonomi digital UMKM di Kawasan Wisata Telaga Ngebel.

SARAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih fokus pada satu desa penyangga dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang belum mengukur dampak penggunaan QRIS terhadap peningkatan omzet secara statistik, serta belum melibatkan perspektif wisatawan maupun pihak perbankan atau PJSP. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed method *)* pada mencakup kawasan wisata yang lebih luas dengan melibatkan wisatawan dan penyedia layanan pembayaran untuk menguji secara empiris pengaruh literasi digital dan persepsi risiko terhadap kinerja keuangan UMKM. Selain itu, studi longitudinal diperlukan guna memberikan efektivitas jangka panjang program

pendampingan *pembinaan door-to-door* dan peran kader digital desa dalam menekan praktik adopsi semu (*pseudo-adopsi*).

DAFTAR PUSTAKA

Afriyanti, D. (2022). Dampak penggunaan QRIS pada UMKM di Kota Pekanbaru dalam rangka mendorong perkembangan ekonomi digital. *Jurnal Khazanah Ulum Perbankan Syariah (JKUPS)*, 6(2), 1–6. https://doi.org/10.56184/jkupsjournal.v6i2.209

Aman, I., Yuvita, Y., & Hafd, A. (2023). Efektivitas penggunaan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) di Pasar Tradisional Pabaeng-Baeng Kota Makassar. *ECo-Buss*, 6(2), 870–881. https://doi.org/10.32877/eb.v6i2.1052

Annisa, N. N., Rahawarin, M. A., & Pattimukay, J. (2023). Digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS dalam mendorong inklusi keuangan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 4(1), 45–58. https://doi.org/10.61132/jumabedi.v3i2.1324

Awaluddin, A., Awaluddin, A., Suci, W., Asriani, A., & Fahmi, M. (2025). Hambatan transformasi digital UMKM perdesaan pascasosialisasi teknologi pembayaran. *Jurnal Inovasi Ekonomi Masyarakat*, 12(1), 112–125. https://doi.org/10.24014/ekl.v9i1.39582

Bank Indonesia. (2019). *Panduan merchant QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)*. Jakarta: Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/QRIS/default.aspx

Buchdadi, A. D., Rahmawati, R., Siregar, M., Muttaqien, Z., & Zaki, M. (2024). Interoperabilitas sistem pembayaran QRIS dan dampaknya terhadap efisiensi ritel. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 26(1), 33–44. https://doi.org/10.59696/prinsip.v4i1.226

Daulay, M., Siahaan, S., & Metris, D. (2026). Adopsi penggunaan QRIS di era pembayaran digital untuk UMKM: Pengaruh *perceived ease of use* dan *perceived risk* dengan moderasi *digital literacy*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 13(1), 75–89. https://doi.org/10.69693/ijim.v4i4.3000

Edwards, G. C., III. (1980). *Implementing public policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press. https://www.cqpress.com

Iskandar, A., Gazali, M., & Prihanisetyo, A. (2025). Ekosistem ekonomi digital dan transformasi usaha mikro di era modern. *Jurnal Bisnis dan Digital Kreatif*, 8(2), 150–165. https://doi.org/10.32832/jbdk.v8i2.452

Jodi, I. M., & Irwansyah, I. (2025). Pengaruh kemudahan penggunaan dan manfaat penggunaan terhadap minat menggunakan QRIS pada pedagang di kawasan wisata. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 10(1), 88–102. https://doi.org/10.26905/jpp.v10i1.789

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya. https://rosda.co.id/produk/metodologi-penelitian-kualitatif/

Rahmadaniah, H., Sari, B. P., Arwandi, S., & Panorama, M. (2025). Dampak penggunaan QRIS terhadap aktivitas ekonomi pedagang di Pasar 16 Ilir Palembang. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam*, 5(1), 61–74. https://doi.org/10.21274/sosebi.v5i1.9876

Roni, K., Batubara, M., Zahra, F., Irvansyah, M., & Siregar, N. (2026). Akselerasi digitalisasi pembayaran non-tunai dalam meminimalkan risiko peredaran uang palsu pada UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 15(1), 22–35. https://doi.org/10.35590/jieb.v15i1.4012

Saputra, A., Mursalim, M., Abdullah, M., Mihrad, M., Aribawa, D., Bande, A., Mulyani, S., Nurhasanah, N., & Cahyadi, A. (2026). Determinan kegagalan transformasi perilaku digital UMKM perdesaan tanpa pendampingan berkelanjutan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Nusantara*, 3(2), 140–155. https://doi.org/10.35906/jpmn.v3i2.1120

Septiyah, R., Zaki, M., Mustaqim, A., & Putrihadiningrum, R. (2026). Rekonstruksi Technology Acceptance Model dalam adopsi fintech syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 18(1), 10–24. https://doi.org/10.15408/iqtishad.v18i1.2981

Sinaga, R., Jannah, M., Raafigustina, M., Sitompul, A., & Lusa, S. (2025). Efektivitas penggunaan *mobile payment* QRIS dalam meningkatkan penjualan UMKM di bidang kuliner. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 18(2), 90–104. https://doi.org/10.35814/jrbm.v18i2.3340

Sriekaningsih, A., Riyanto, S., & Prakasa, Y. (2022). Implementasi prinsip UNGGUL QRIS dalam memperkuat daya saing usaha mikro. *Jurnal Bisnis Strategi*, 31(2), 115–128. https://doi.org/10.14710/jbs.31.2.115-128

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. https://cvalfabeta.com/product/metodologi-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd/

Weku, J., Aldrin, N., & Ridha, M. (2026). Analisis *perceived risk* dan *digital literacy* terhadap keputusan penggunaan QRIS pada pedagang kecil. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 9(1), 50–65. https://doi.org/10.7454/jabt.v9i1.1098

Zaimar, O. (2025). Otomatisasi pencatatan keuangan berbasis *real-time* melalui transaksi QRIS pada UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 13(1), 12–25. https://doi.org/10.22146/jakp.v13i1.7821